

PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS-RETRIBUSI
2012

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 8, LD.2012/NO.8. TLD. NO. 8. 12 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

ABSTRAK:

- Bahwa pemberian pelayanan Retribusi Penyediaan dan/ Atau Penyedotan Kakus kepada masyarakat merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan perkembangan situasi dan kondisi saat ini; bahwa ketentuan pasal 110 huruf j dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyediaan dan/ Atau Penyedotan Kakus dikategorikan sebagai jenis retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip

dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administrasi; penagihan; tata cara pemungutan; pemanfaatan; keberatan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup..

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2012
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Seri C Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 halaman.